

**PENGARUH OPINI AUDIT DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT
KORUPSI
(STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2016)**

***THE INFLUENCE OF AUDIT OPINION AND AUDIT FINDINGS ON THE LEVEL OF
CORRUPTION
(STUDY ON LOCAL GOVERNMENTS IN INDONESIA 2016)***

Nurul Husna¹, Sri Rahayu², Dedik Nur Triyanto³

^{1,2,3}Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹nurulhusna077@gmail.com ²srirahayu@telkomuniversity.co.id ³dedik.triyanto@gmail.com

Abstrak

Hasil audit BPK Opini audit dan Temuan audit pada laporan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan akuntabilitas suatu pemerintah daerah dan seharusnya diharapkan mengurangi terjadinya korupsi. Terkait dengan hal itu, terdapat pemerintah daerah yang mendapatkan hasil audit yang baik tetapi masih terjerat tindak pidana korupsi. sehingga, perlu dilakukan penelitian tentang opini audit dan temuan audit pemerintah daerah untuk melihat keterkaitan opini audit dan temuan audit dengan tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui opini audit dan temuan audit serta tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia dan menganalisis pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik analisis regresi berganda. Sampel pada penelitian ini antara lain 60 instansi pemerintah daerah yang masuk dalam Survei Integritas Sektor Publik yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode 2013.

Berdasarkan hasil pengolahan data, rata-rata opini audit yang diperoleh pemerintah daerah adalah opini audit wajar dengan pengecualian. Temuan audit yang diperoleh masih dalam klasifikasi sedang. Sedangkan, tingkat korupsi pada pemerintah daerah masih rendah. Hasil pengolahan data evaluasi pengaruh, menunjukkan bahwa opini audit dan temuan audit tidak berpengaruh secara simultan maupun secara parsial terhadap tingkat korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka untuk mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi sebaiknya memperhatikan sistem pengendalian internal dan kepatuhan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : Opini audit, Temuan audit, Tingkat Korupsi

Abstract

BPK audit results audit opinion and audit findings on local government financial report showing accountability a local government expected and supposed to reduce the occurrence of corruption. Regarding that, There are local governments get the result of audit better way but are still trapped of corruption. So that, needs to be done research on audit opinion and audit findings the local government to see entanglement audit opinion and audit findings with a corruption in local governments in Indonesia.

This research aims to understand audit opinion and audit findings and the level of corruption in local governments in Indonesia and analyze the influence of audit opinion and audit findings on the level corruption in local governments in Indonesia.

This research uses secondary data with multiple linear regression analysis. Sample in this research among others 60 regional government agencies in integrated public sector survey conducted corruption eradication commission (KPK) in the period 2013.

Based on the results of data processing, the average of audit opinion obtained the local governments is qualified opinion. The audit findings still in the middle classification. While, the level of corruption in the local government still low. The results of data processing influence evaluation, shows that audit opinion and audit findings not affect simultaneously and partial on the level of corruption.

Based on the results of research, then to reduce the corruption should pay attention internal control system and compliance legislation.

Key word : Audit Opinion, Audit Findings, Level of Corruption

1. Pendahuluan

Dewasa ini, korupsi yang terjadi di pemerintah daerah semakin meningkat dikarenakan kurangnya pengawasan dan rusaknya mental para pejabat daerah. Dalam hal ini, audit eksternal diharapkan dapat mengambil peran dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan audit eksternal adalah opini audit dan temuan-temuan dalam auditnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa opini audit mencerminkan akuntabilitas yang baik sehingga peluang terjadinya korupsi semakin rendah.

Meskipun begitu, ditemukan terdapat beberapa pemerintah daerah yang terjerat kasus korupsi meski hasil audit pada pemerintah daerah tersebut adalah wajar tanpa pengecualian. Hasil pemeriksaan audit eksternal seharusnya dapat mendeteksi terjadinya korupsi. Hal ini menjadi permasalahan karena dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap hasil audit BPK yang dianggap tidak mampu mendeteksi adanya korupsi.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui opini audit, temuan audit dan tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia, serta mengetahui pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia.

2. Dasar Teori dan Metodologi

Opini Audit

Menurut Hery^[6], sebagai tahap akhir dari keseluruhan proses audit, sangatlah penting dalam setiap penugasan untuk mengkomunikasikan berbagai hasil temuan auditor eksternal. Para pemakai laporan keuangan mengandalkan laporan auditor untuk mendapatkan asurans atau laporan keuangan tersebut. Auditor akan bertanggung jawab apabila laporan audit yang diterbitkannya tidaklah tepat.

Laporan audit standar wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh akuntan publik (auditor eksternal) apabila semua kondisi audit telah terpenuhi dan tidak ada salah saji yang signifikan serta laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi.

Laporan laporan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, dimana laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi auditor merasa perlu atau wajib untuk memberikan informasi tambahan.

Laporan pendapat wajar dengan pengecualian diterbitkan apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar, tetapi terdapat pembatasan dalam ruang lingkup audit atau kelalaian dalam mematuhi standar akuntansi.

Laporan pendapat tidak wajar diterbitkan hanya apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang sangat material atau sangat menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi.

Laporan menolak memberikan pendapat diterbitkan apabila auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan klien secara keseluruhan telah disajikan secara wajar.

Temuan Audit

Menurut SPKN^[11], temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi awal kecurangan disajikan dalam LHP tanpa menjelaskan secara mendetail dugaan kecurangan tersebut. Namun pemeriksa lebih menitikberatkan penjelasannya kepada dampak temuan tersebut terhadap hal pokok/informasi hal pokok sesuai tujuan pemeriksaan. Dalam Arsana^[3], menyebutkan dalam ilmu auditing, sebuah temuan audit harus memenuhi atribut sebagai berikut:

Kondisi. Dalam hal pengadaan barang/jasa, kondisi adalah realisasi atau pelaksanaan pengadaan barang/jasa yaitu apa yang sudah terjadi.

Kriteria. Kriteria adalah semua peraturan tertulis yang menjadi dasar perencanaan atau yang mengatur suatu kegiatan, yaitu apa yang seharusnya terjadi.

Sebab. Apabila terjadi ketidaksesuaian atau penyimpangan/deviasi, auditor harus mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.

Akibat adalah konsekuensi langsung maupun tidak langsung karena pelaksanaan kegiatan (apa yang sudah terjadi) yang tidak sesuai dengan peraturannya (apa yang seharusnya terjadi).

Rekomendasi. Rekomendasi yaitu saran auditor berdasarkan keahlian kepada auditee untuk melakukan sesuatu (yang disarankan).

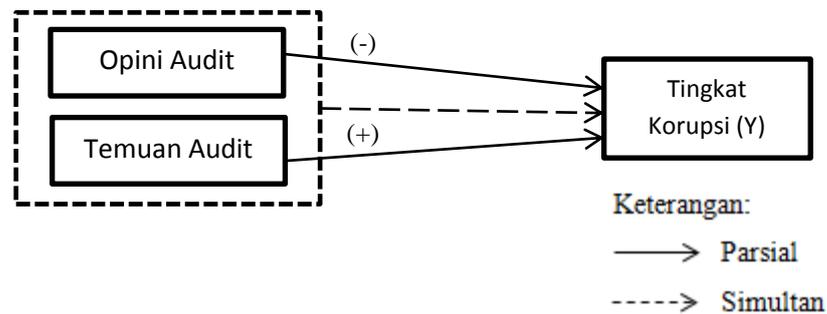
Tingkat Korupsi

Menurut Tuanakotta^[12], What is Corruption? Korupsi umumnya didefinisi adalah keuntungan pribadi. Korupsi yang didefinisikan seperti itu meliputi, misalnya, penjualan kekayaan Negara secara tidak sah oleh pejabat, kickbacks dalam pengadaan di sektor pemerintahan, penyuapan, dan "pencurian" (embezzlement) dana-dana pemerintah.

Menurut Santoso^[9], secara umum, beberapa faktor penyebab maraknya korupsi antara lain adalah penegakan hukum yang lemah (rendahnya probabilitas untuk tertangkap, dituntut dan dihukum serta keberadaan mafia hukum), administrasi birokrasi yang membuka peluang korupsi (perijinan, kewenangan yang luas, mata rantai birokrasi,dll.), gaji rendah, kesenjangan gaji, rendahnya etika dan moralitas.

Dampak korupsi yang paling utama adalah runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa (Alfitra)^[1].

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Metologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel 60 instansi pemerintah daerah yang masuk dalam survei integritas sektor publik KPK tahun 2013. Data diperoleh dari website resmi BPK RI dan website KPK. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan teknik analisis regresi linier berganda.

3. Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan statistik deskriptif untuk seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan secara rata-rata tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia yakni sebesar 3.2033. Pemerintah Kota Jayapura memiliki tingkat korupsi tertinggi yaitu sebesar 4.32, sedangkan Pemerintah Kota Pare-Pare memiliki tingkat korupsi terendah yaitu sebanyak 2.29. Standar deviasi untuk variabel tingkat korupsi yaitu 0.44484.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa rata-rata opini audit pemerintah daerah di Indonesia adalah 3.6. Dapat dikatakan bahwa nilai tersebut menunjukkan opini audit wajar dengan pengecualian. Sehingga, rata-rata opini audit yang diperoleh pemerintah daerah di Indonesia adalah wajar dengan pengecualian. Dari 60 pemerintah daerah dalam sampel, terdapat 14 pemerinah kota yang memperoleh opini audit WTP, 12 pemerintah kota yang memperoleh opini audit WTP DPP, 2 pemerintah kota yang memperoleh opini audit TMP dan selebihnya merupakan opini audit WDP. Standar deviasi untuk variabel opini audit yaitu 0.96023.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diperoleh rata-rata temuan audit sebesar 2.25. Dapat dikatakan nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata temuan audit pada pemerintah daerah di Indonesia dalam klasifikasi sedang. Pemerintah daerah yang memiliki temuan kasus paling tinggi pada adalah DKI Jakarta yaitu sebanyak 74 kasus, sedangkan pemerintah daerah yang memiliki temuan kasus paling rendah adalah pemerintah kota Madiun yaitu sebanyak 1 kasus. Dari 60 pemerintah daerah dalam sampel, terdapat 21 pemerintah daerah dengan temuan audit klasifikasi banyak, 36 pemerintah daerah dengan klasifikasi temuan audit sedikit dan 3 pemerintah daerah dengan temuan audit klasifikasi sedang. Standar deviasi untuk variabel temuan audit yaitu 0.95002.

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, pengujian regresi berganda menggunakan uji asumsi klasik. Dalam hal ini uji asumsi klasik meliputi : uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokolerasi dan uji heterokedastisitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak, model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Model regresi yang terdistribusi normal memiliki nilai lebih besar dari 0.05. Berdasarkan hasil pengujian,, dapat dilihat nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang diperoleh sebesar 0.806. Sehingga, model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal dan memenuhi asumsi klasik.

Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel variabel independen. Model regresi yang baik tidak terdapat korelasi diantara variabel independennya. Uji Multikolonieritas yang tidak terdapat kolerasi dalam variabel independen yakni yang memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa variabel independen dalam penelitian ini memperoleh nilai tolerance 0.817 dan nilai VIF 1.223. Sehingga, variabel indepeden dalam penelitian ini merupakan model regresi yang baik karena tidak terdapat kolerasi antar variabel independennya.

Uji Autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terdapat kolerasi antara pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtun waktu pada sampel dengan data time series dengan n-

sampel adalah periode waktu. Berdasarkan waktu pelaksanaan, penelitian ini merupakan penelitian cross sectional. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dapat melakukan pengujian autokorelasi.

Uji heterokedastisitas digunakan untuk melihat ada tidaknya terjadi heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan nilai residualnya SRESID. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa plot menyebar dan pola-pola tegak lurus pada sumbu y dalam gambar. Disimpulkan bahwa model regresi terdapat dugaan terjadi heterokedastisitas. Untuk itu, hasil tersebut dapat diatasi dengan menggunakan metode glejser. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa hasil uji metode glejser menunjukkan sig. 0.271 dan 0.922 yang berarti lebih besar dari 0.05. Dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan tingkat ketepatan garis regresi. penelitian ini untuk melihat seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui angka R square 0.025. Hal ini mengindikasikan bahwa hanya 2.5% pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya, sisanya 97.5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Pengujian Hipotesis dan Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersamaan (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai signifikansi F dan nilai $\alpha = 0.05$. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari nilai α maka terdapat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Berikut hasil pengujian simultan pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.286	2	.143	.716	.493 ^b
	Residual	11.389	57	.200		
	Total	11.675	59			

a. Predictors: (Constant), TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT

b. Dependent Variable: TINGKAT KORUPSI

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan tabel 1, nilai F 0.716 dengan nilai sig sebesar 0.493. Nilai signifikansi F lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan dari hasil uji F ini bahwa variabel opini audit dan temuan audit dalam penelitian ini secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Hasil ini berbeda dengan hipotesis yang di kemukakan mengakibatkan H1 ditolak.

Hasil pengujian secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu opini audit dan temuan audit secara individu (parsial) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu tingkat korupsi. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan nilai signifikansi t dan nilai $\alpha = 0.05$. Jika nilai signifikansi t lebih besar dari nilai α maka terdapat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji t yang ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.256	.231		14.097	.000
	OPINI AUDIT	.036	.067	.078	.536	.594
	TEMUAN AUDIT	-.081	.068	-.173	-1.196	.237

a. Dependent Variable: TINGKAT KORUPSI

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan tabel 4.6 maka model persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 3,256 + 0,036 \text{ Opini Audit} - 0,081 \text{ Temuan Audit}$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat diperkirakan apabila variabel independen meningkat sebesar satu dan nilai variabel independen lainnya konstan, maka besarnya variabel dependen sesuai dengan tanda koefisien regresi variabel independennya.

$a = 3.256$ artinya variabel tingkat korupsi akan tetap sebesar 3.244 tanpa adanya variabel-variabel independen.

$b_1 = 0.036$ artinya variabel opini audit dengan nilai 0.036 bertanda positif menandakan peningkatan atau setiap kenaikan opini audit sebesar satu maka menyebabkan kenaikan variabel tingkat korupsi sebesar 3.6%.

$b_2 = 0.081$ artinya variabel temuan audit dengan nilai -0.081 bertanda negatif menandakan penurunan atau setiap kenaikan temuan audit sebesar satu menyebabkan penurunan variabel tingkat korupsi sebesar 8.1%.

Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat korupsi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah opini audit secara parsial berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Berdasarkan tabel 2, nilai signifikan variabel opini audit adalah 0.594. Nilai tersebut lebih besar daripada 0.05 dapat disimpulkan bahwa variabel opini audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat korupsi, maka H_2 ditolak. Ini berarti bahwa baik atau pun tidak baik hasil audit opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah. Pemerintah kota Jayapura, Bandar Lampung dan Surakarta membuktikan bahwa opini audit WTP yang diperoleh tetapi tingkat korupsi pada pemerintah daerah tersebut masih tinggi.

Opini audit yang dihasilkan oleh BPK atas dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak (saran pers BPK)^[10]. Ini membuktikan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damiati dan Rini^[4] serta Heriningsih dan Marita^[5] bahwa opini audit yang baik tidak menjadi jaminan bebasnya suatu pemerintah daerah dari korupsi. Menurut Heriningsih dan Marita^[5], opini auditor sering dijadikan sebagai pengukuran kinerja suatu daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya yang berasal dari pihak eksternal, sehingga seringkali terdapat gejala di daerah terkesan memburu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat korupsi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah temuan audit secara parsial berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Berdasarkan tabel 2, nilai signifikan variabel temuan audit sebesar 0.237. Nilai tersebut lebih besar daripada 0.05 dapat disimpulkan bahwa variabel temuan audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, maka H_3 ditolak. Ini berarti bahwa semakin banyak atau semakin sedikit temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah. Seperti pemerintah DKI Jakarta, walaupun memiliki jumlah temuan audit tertinggi tetapi pemerintah DKI Jakarta merupakan pemerintah kota yang tingkat korupsinya terendah urutan ke 16.

Hal ini disebabkan temuan audit dalam penelitian ini merupakan temuan audit kepatuhan peraturan dan perundang-undangan yang berarti pemerintah daerah yang tidak melanggar peraturan dapat melakukan korupsi. Pelanggaran tersebut bisa jadi tidak material dan bukan merupakan temuan audit yang menunjukkan dugaan adanya korupsi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Algameta^[2], bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan laporan keuangan pemerintah daerah secara statistik tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.

4. Kesimpulan dan Saran

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa pada variabel Opini Audit dalam penelitian ini rata-rata yang didapat adalah opini audit wajar dengan pengecualian. Dari 60 pemerintah daerah di Indonesia yang menjadi sampel, 32 memperoleh opini audit wajar dengan pengecualian. Pada variabel temuan audit dalam penelitian ini, Terdapat 21 pemerintah daerah temuan dengan klasifikasi banyak dan terdapat 36 pemerintah daerah temuannya dengan klasifikasi sedikit. Sedangkan, pada variabel tingkat korupsi dalam penelitian ini, diketahui bahwa tingkat korupsi pada pemerintah daerah masih rendah.

Hasil pengujian analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh opini audit dan temuan audit secara simultan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Hasil pengujian

analisis regresi linier berganda juga menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh opini audit secara parsial dan tidak terdapat pengaruh temuan audit secara parsial terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- [1] Alfitra. (2014). *Modus Operandi Pidana Khusus di luar KUHP korupsi, money laundering, dan trafficking*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- [2] Algameta, M. F. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- [3] Arsana, I Putu Jati. (2016). *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Deepublish.
- [4] Damiati, Liska dan Rini. (2017). *Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia*. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, (Vol. 4, No. 1), 1-18.
- [5] Heriningsih, Suchyo dan Marita. (2013). *Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa)*. *Buletin Ekonomi*, (Vol. 11, No. 1), 1-86.
- [6] Hery. (2016). *Auditing dan Asurans*. Jakarta: Grasindo.
- [7] Masyitoh, R. Diyah, Wardhani, Ratna dan Setyaningrum, Dyah. (2015). *Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010*. (Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara), Medan.
- [8] Rini dan Sarah, A. (2014). *Opini Audit dan Pengungkapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten serta Kaitannya dengan Korupsi di Indonesia*. *Jurnal Etikanomi*, (Vol. 13).
- [9] Santoso, T., Chandra, R., Sinaga, A. C., Muhajir, M., dan Mardiah, S. (2011). *Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu*. Bogor, CIFOR
- [10] Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, (2011)
- [11] Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, (2017)
- [12] Tuanakotta, Theodorus M. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- [13] Yuliyana, Ika dan Setyaningrum, Dyah. (2016). *Pengaruh Penerapan E-Government dan Akuntabilitas terhadap Persepsi Korupsi di Kementerian/Lembaga*. (Simposium Nasional Akuntansi XIX), Lampung.